

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN  
TENGGERA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE**

# **LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024**



**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE  
2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Watampone. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta masukan sangat diharapkan agar ditahun-tahun yang akan datang lebih baik.

Watampone, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Matheus Adhiatera

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	4
B. Wilayah Kerja.....	5
C. Faktor–faktor penunjang keberhasilan.....	5
D. Sistematika Pelaporan .....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Rencana Strategis.....	7
Visi DJP.....	7
Misi DJP .....	7
B. Tujuan .....	7
C. Sasaran.....	8
D. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	8
1. Kebijakan .....	8
2. Program .....	9
E. PENETAPAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	11
1. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal .....	12
2. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi .....	17
3. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan Tahun sebelumnya yang tinggi .....	19
4. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif .....	20
5. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan Pembayaran masa yang efektif .....	21
6. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif .....	22
7. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan Hukum yang Efektif.....	25
8. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan Informasi yang berkualitas.....	28
9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif IKU.....	29
10. Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel .....	31
B. REALISASI ANGGARAN .....	32
BAB IV PENUTUP .....	34
LAMPIRAN .....	35
1. Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Watampone .....	35
2. Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) .....	35



## BAB I PENDAHULUAN

---

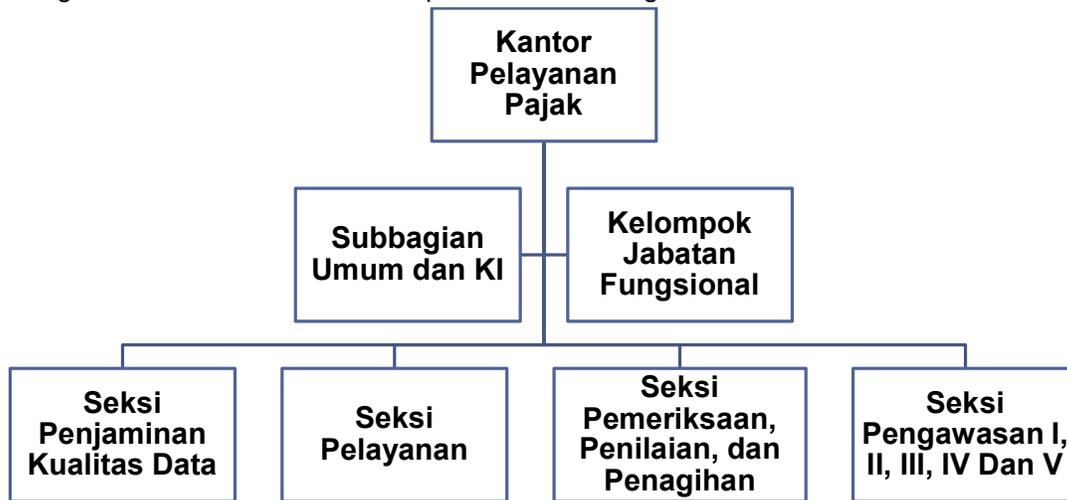
### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone (KPP Pratama Watampone) sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada Pasal 58 KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sesuai pasal 59, KPP Pratama Watampone menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan, dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Watampone adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dalam Wilayah Kerja dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dengan Struktur Organisasi KPP Pratama Watampone adalah sebagai berikut:



## B. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Watampone meliputi 3 Kabupaten yakni Bone, Wajo dan Soppeng. Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan dengan luas wilayah 4.567,36 km<sup>2</sup>. Kabupaten Wajo terdiri dari 14 kecamatan dan 190 desa/kelurahan dengan luas wilayah 2.608,71 km<sup>2</sup>. Sedangkan Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 kecamatan dan 70 desa/kelurahan dengan luas wilayah 1.385,55 km<sup>2</sup>. Dari Tiga Kabupaten tersebut terdapat 80.143 Wajib Pajak aktif dengan rincian 6.253 Wajib Pajak Badan, 73.104 Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 786 Wajib Pajak Pemungut. (Data Per 31 Desember 2024)

## C. Faktor–faktor penunjang keberhasilan.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan mencapai tujuan organisasi terletak pada sumber daya yang dimiliki. Untuk KPP Pratama Watampone, hal tersebut meliputi antara lain :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Tersedianya perundang-undangan dan aturan pelaksanaan;
3. Tersedianya dana operasional yang memadai;
4. Terjalinnnya kerja sama yang mantap dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait;
5. Terlaksananya pemberian pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.

## D. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Bab I Pendahuluan
4. Bab II Perencanaan Kinerja
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
6. Bab IV Penutup

7. Lampiran:
  - a. Kontrak Kinerja
  - b. Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

### A. Rencana Strategis

#### Visi DJP

Visi merupakan kerangka berpikir yang memberikan gambaran tentang identitas diri (*core values* dan *core purpose*) serta keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone dalam menjalankan tugas pokoknya melaksanakan Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

"Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan."

#### Misi DJP

Misi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan serta kebijakan Pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi didalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktifitas dan berinteraksi. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah :

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak berintegritas, professional, dan bermotivasi.

### B. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

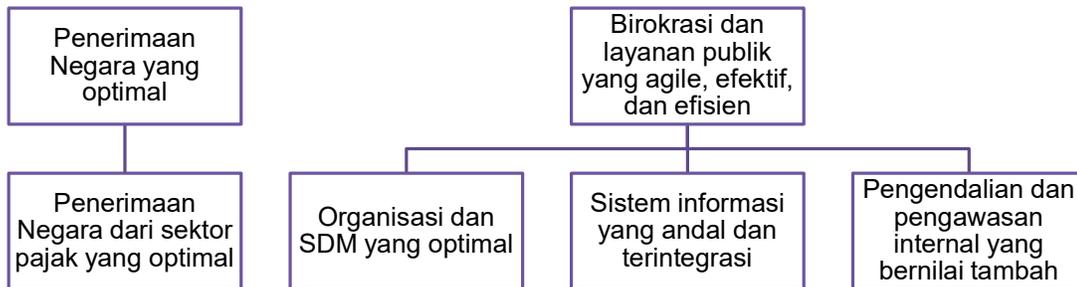
Tujuan lembaga menggambarkan isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, disamping itu tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai oleh KPP Pratama Watampone adalah :

1. Penerimaan Negara yang optimal;

2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

### C. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan yang ada perlu dibuat sasaran, sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, bulanan. Sasaran yang telah disusun Direktorat Jenderal Pajak dan juga menjadi tanggung jawab Unit Kerja dibawahnya, termasuk KPP Pratama Watampone adalah :



### D. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dibuat langkah-langkah yang dituangkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut :

#### 1. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Kebijakan DJP yang diimplementasikan oleh KPP Pratama Watampone adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan penerimaan dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM);
2. Peningkatan realisasi penerimaan dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) ;
3. Pencapaian penerimaan perpajakan dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan;
4. Peningkatan Efektifitas layanan kepada stakeholder terkait, utamanya kepada masyarakat luas sebagai pengguna layanan publik;
5. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan SDM;
6. Pengembangan layanan perpajakan berbasis digital;
7. Penguatan tata kelola pengendalian internal.

## 2. Program

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program dapat bersifat jangka panjang dan menengah dengan tenggang waktu antara tiga sampai dengan lima tahun. Program didasarkan atas perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program yang harus dilaksanakan oleh KPP Pratama Watampone sebagai unit di bawah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan pembayaran dan pelaporan atas SPT Masa dan/atau Tahunan yang atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan diterbitkan Surat Teguran atau STP;
2. Pengawasan Dinamisasi angsuran pajak dalam Tahun Berjalan (Angsuran PPh Pasal 25);
3. Penelitian dan Tindaklanjut *data matching*;
4. Pengawasan Fasilitas yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak;
5. Pengawasan *Data Outstanding approweb*;
6. Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi kategori High Wealth Individuals (HWI) dan Wajib Pajak Grup;
7. Tindaklanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi;
8. Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan;
9. Pemeriksaan Data Konkret (*Single Tax*);
10. Kunjungan (*Visit*) atas SP2DK terbit;
11. Analisis data mandiri dan produksi alket;
12. Kegiatan pemeriksaan dan penagihan;
13. Percepatan penyelesaian layanan untuk *stakeholder*;
14. Pengawasan penyampaian SPT Tahunan PPh;
15. Peningkatan *benchmarking* sektor tertentu;
16. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas kegiatan penyuluhan perpajakan;
17. Tindaklanjut atas hasil Rapimnas dan Rakorda;
18. Penyelesaian atas temuan Inspektorat Jenderal dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan;
19. Pelaksanaan atas administrasi kepegawaian;
20. Penatalaksanaan atas Barang Milik Negara;
21. Penyampaian informasi kepada Masyarakat melalui Media Massa;
22. Pelaksanaan survei atas tugas dan fungsi KPP Pratama;
23. Tindaklanjut atas saran dari *stakeholder*.

## E. PENETAPAN KINERJA

Berikut merupakan perjanjian kinerja KPP Pratama Watampone Tahun 2024:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,54%	Max	E/L	26,00%	57,78%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyekel perencanaan kea	100,00	57,36	Max	P/L	19,00%	42,22%
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,46%	Max	E/L	26,00%	57,78%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampalan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	135,06%	Max	P/L	19,00%	42,22%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	105,11%	Max	E/M	21,00%	100,00%
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,81%	Max	E/M	21,00%	50,00%
5	Pengawasan pembayaran masa						
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	50,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,41%	Max	P/M	14,00%	33,33%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	91,42%	Max	P/M	14,00%	33,33%
7	Penegakan hukum yang efektif						
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,76%	Max	P/M	14,00%	26,92%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	84,82%	Max	P/L	19,00%	36,54%
7c-N	Persentase penyampalan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%
8	Data dan Informasi yang berkualitas						
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25,00%</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,24	Max	P/M	14,00%	33,33%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,84	Max	P/M	14,00%	33,33%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,71	Max	P/M	14,00%	33,33%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	92,65	Max	P/M	14,00%	100,00%
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>							



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>99,43</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,43
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,94%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,94
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,36	Max	P/L	19,00%	42,22%	97,36
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>106,91</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,71
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,46%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,46
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	135,06%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							105,11
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	105,11%	Max	E/M	21,00%	100,00%	105,11
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>114,86</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,91
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,81%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,81
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							110,27
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,41%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,41
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	91,42%	Max	P/M	14,00%	33,33%	91,42
7	Penegakan hukum yang efektif							110,10
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,76%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,76
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	84,82%	Max	P/L	19,00%	36,54%	113,09
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00

Learning & Growth Perspective							25,00%	109,97
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,68
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,24	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,24
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,84	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,23
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,71	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							108,25
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	92,65	Max	P/M	14,00%	100,00%	108,25
Nilai Kinerja Organisasi								107,41

Sumber: Dashboard Kinerja Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan IV 2024 pada Aplikasi Mandor

## 1. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

### 1. IKU 1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak

Uraian	Nominal
Target Penerimaan Pajak Tahun 2024	Rp 466.517.328.000
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024	Rp 470.924.039.531
Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2024	100,94 %
Capaian	100,94%

Persentase realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone pada tahun 2024 mencapai penerimaan sebesar 100,94% atau Rp 470.924.039.531,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 466.517.328.000,-

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
Realisasi Penerimaan	Rp 470.924.039.531	Rp 441.472.925.192	Rp 444.199.474.697

- Penerimaan pajak tahun 2024 mengalami pertumbuhan penerimaan sebesar 6,67% apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023.
- Kenaikan Pagu Anggaran Instansi Vertikal dari Rp 1.517,4 Miliar di Tahun 2023 menjadi Rp 1.777 Miliar di Tahun 2024. Kenaikan Pagu Anggaran Pemerintah Daerah dan Dana Desa Kabupaten Bone dari Rp 2.118 Miliar di 2023 menjadi Rp 2.284 Miliar di 2024. Kenaikan Pagu Anggaran Pemerintah Daerah dan Dana Desa Kabupaten Wajo dari Rp 1.307 Miliar di 2023 menjadi Rp 1.399 Miliar di 2024. Kenaikan Pagu Anggaran Pemerintah Daerah dan Dana Desa Kabupaten Soppeng Rp 1.021 Miliar di 2023 menjadi Rp 1.044 Miliar di 2024.
- Total seluruh Pagu Anggaran di Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah dan Dana Desa Naik dari Rp 5.963,14 Miliar di 2023 menjadi Rp 6.504 Miliar di 2024.

Sektor	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Peranan Tahun 2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,528,497,121	5,344,782,501	9,011,965,704	1.91%
Pertambangan dan Penggalian	7,010,889,849	2,667,832,987	4,373,021,036	0.93%
Industri Pengolahan	12,420,349,145	16,976,223,311	30,001,306,177	6.37%
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	10,406,977,050	10,304,099,309	13,488,304,444	2.86%

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	206,086,134	604,043,064	414,911,215	0.09%
Konstruksi	21,525,552,727	8,788,361,306	2,736,379,057	0.58%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	51,196,247,156	45,497,969,699	43,249,696,060	9.18%
Transportasi dan Pergudangan	17,873,801,964	17,519,238,860	17,337,447,725	3.68%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	942,737,691	665,236,301	853,830,870	0.18%
Informasi dan Komunikasi	328,262,861	183,531,973	325,143,629	0.07%
Jasa Keuangan dan Asuransi	23,270,616,029	28,887,598,021	43,391,333,919	9.21%
Real Estate	1,426,680,637	1,670,080,793	1,750,555,408	0.37%
Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,082,658,472	2,985,828,672	2,224,304,851	0.47%
Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	826,902,878	957,668,310	1,742,523,799	0.37%
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	271,297,414,080	289,244,800,193	291,263,659,377	61.85%
Jasa Pendidikan	394,883,853	782,964,752	529,926,397	0.11%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,044,125,855	965,460,189	1,288,841,498	0.27%
Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	95,696,955	54,063,596	191,793,674	0.04%
Kegiatan Jasa Lainnya	1,142,512,669	380,876,948	576,137,840	0.12%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	2,006,756	491,331	1,825,035	0.00%
Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	2,086,727	-1,500,000	77,500	0.00%
Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	10,484,067,217	5,636,136,402	4,204,101,609	0.89%
Wajib Pajak KLU Error	7,690,420,871	1,357,136,674	1,943,570,835	0.41%
Total	444,199,474,697	441,472,925,192	470,900,657,659	

- Kontribusi Penerimaan Sektor Administrasi Pemerintahan Dan Jaminan Sosial Wajib masih memberikan kontribusi terbesar di Tahun 2024 yaitu sebesar 61,85%, mengalami pertumbuhan 0,70% dibandingkan Tahun 2023.
- Penerimaan dari beberapa sektor tumbuh positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak dari melandainya pandemi covid-19.
- Berlakunya PMK-59/PMK.03/2022 menyebabkan pergeseran setoran yang sebelumnya tersetor pada Wajib Pajak Rekanan (yang utamanya pada sektor Konstruksi) beralih ke sektor Adminstrasi Pemerintahan.

Adapun hal – hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yaitu dengan cara:

- Menguji kepatuhan formal dan material SPT Masa dan penyeteroran pajak secara intens atas wajib pajak penentu penerimaan yang penyeterorannya mengalami *shortfall*.
- Penggalian potensi wajib pajak profesi dan sektoral.
- Penggalian sektoral (perkebunan, rokok, perikanan, dll).
- Pengawasan atas pembayaran rutin dari sektor administrasi pemerintahan.
- Menerbitkan STP Pasal 7 dan 9(2)a atas keterlambatan setoran penerimaan rutin dan non rutin.
- Pengawasan pembayaran masa wajib pajak besar.

Selain itu, telah dilaksanakan mitigasi risiko oleh KPP Pratama Watampone antara lain dengan:

- *Sharing session* atau Forum *Account Representative* dari pelaksana, sesama *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan/atau pejabat kantor lain.
- Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan edukasi terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD.
- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya yang jatuh temponya pada Tahun 2023 dan selain Tahun 2023.
- Melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
- Melakukan tindak lanjut atas data approweb dengan memprioritaskan tahun pajak dan nilai potensi pajak.

**2. IKU 1b-CP: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

Uraian	Indeks
Target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024	100
Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024	97,36
Capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024	97,36

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri atas 2 (dua) aspek yakni indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dengan bobot 50% dan indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas dengan bobot 50%. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu komponen pertumbuhan nasional dengan bobot 60% dan komponen pertumbuhan unit kerja dengan bobot 40%. Realisasi penerimaan pajak bruto KPP Pratama Watampone Tahun 2024 sebesar Rp 483.834.125.453,- atau tumbuh positif 6,70% dari penerimaan bruto Tahun 2024. Sementara pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tumbuh positif 1,60%.

Berikut merupakan formula penghitungan IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$\text{Komponen pertumbuhan nasional} = \left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

$$\left( \frac{(1 + 7,81\%)}{(1 + 2,66\%)} \right) \times 100\% = \left( \frac{107,81\%}{102,66\%} \right) = 104,72\%$$

$$\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} = (1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

$$(1 + 7,81\%) \times 100\% = 107,81\%$$

Dari perhitungan kedua komponen tersebut untuk realisasi iku pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah 104,72%.

Sedangkan untuk indeks deviasi proyeksi perencanaan kas telah mencapai 90,00% dengan rumus perhitungan:

Deviasi triwulanan (t) =

$$\left( \frac{|\sum \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \sum \text{Realisasi penerimaan kas tiap bulan}|}{\sum \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan}} \right) \times 100\%$$

Deviasi s.d. triwulan n (tn) =

$$\left( \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n} \right)$$

dengan rincian Proyeksi dan Realisasi Penerimaan sebagai berikut:

Bulan	Proyeksi Penerimaan	Realisasi Penerimaan
Januari	20.584.058.000	21.352.130.439
Februari	20.993.470.000	24.376.995.424
Maret	19.448.091.000	27.076.085.705
April	47.053.214.000	473.86.464.517
Mei	37.128.941.000	39.802.260.977
Juni	34.988.500.000	32.348.685.708
Juli	42.361.108.000	37.180.800.196
Agustus	38.050.201.000	42.250.558.467
September	29.061.022.000	31.341.017.617
Oktober	41.994.360.000	40.222.121.041
November	47.930.244.000	45.261.018.315
Desember	82.760.109.000	82.302.519.253

maka diperoleh realisasi indeks deviasi proyeksi setiap triwulan:

Triwulan	Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas
I	19,69%
II	12,42%
III	11,74%
IV	9,66%

atas realisasi indeks deviasi proyeksi setiap triwulan diperoleh capaian indeks deviasi proyeksi sebesar 90,00%

Secara umum, pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Watampone relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak bruto tahun sebelumnya *year on year (yoy)*. Tabel penerimaan pajak bruto per sektor dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

SEKTOR	PENERIMAAN 2023	PENERIMAAN 2024	PERTUMBUHAN
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	289.244.800.193	291.263.659.377	0,70%
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	28.887.598.021	43.391.333.919	50,21%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	45.492.263.457	43.248.326.060	-4,93%
Industri Pengolahan	16.976.223.311	30.001.029.150	76,72%
Pengangkutan dan Pergudangan	17.519.238.860	17.337.207.725	-1,04%
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	10.304.099.309	13.488.304.444	30,90%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.344.782.501	9.011.075.704	68,60%
Pertambangan dan Penggalian	2.667.832.987	4.373.021.036	63,92%
Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	5.636.190.456	4.234.141.609	-24,88%
Konstruksi	8.794.067.548	2.738.879.057	-68,86%
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2.985.828.672	2.224.304.851	-25,50%
Wajib Pajak KLU Error	1.357.082.620	1.945.990.954	43,40%
Real Estat	1.670.080.793	1.750.555.408	4,82%
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	957.668.310	1.742.523.799	81,95%
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	965.460.189	1.288.841.498	33,50%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	665.236.301	849.484.782	27,70%

Aktivitas Jasa Lainnya	380.876.948	571.682.708	50,10%
Pendidikan	782.964.752	529.926.397	-32,32%
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	604.043.064	414.911.215	-31,31%
Informasi dan Komunikasi	183.531.973	325.143.629	77,16%
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	54.063.596	191.793.674	254,76%
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	491.331	1.825.035	271,45%
Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-1.500.000	77.500	-105,17%

## 2. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

### 1. IKU 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM)

Uraian	Persentase
Target Penerimaan dari Kegiatan PPM 2024	100,00%
Realisasi Penerimaan dari Kegiatan PPM 2024	100,46%
Capaian	100,46%

Untuk IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) KPP Pratama Watampone target yang ditetapkan adalah 100% sedangkan realisasi yang dicapai KPP Pratama Watampone mencapai 100,46%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
Target Penerimaan Kegiatan PPM	361.442.014.000	418.179.890.000
Realisasi Penerimaan Kegiatan PPM	382.010.179.681	420.115.420.752
Capaian Penerimaan Kegiatan PPM	105,69%	100,46%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) dapat dicapai melalui:

- Inovasi prosedur pembayaran untuk memberi kemudahan dan kenyamanan kepada Wajib Pajak sehingga kepatuhan pembayarannya dapat ditingkatkan, salah satunya adalah dengan layanan SMS Billing KPP Pratama Watampone untuk Wajib Pajak Usahawan dan Bendahara Pemerintah.
- Peningkatan frekuensi edukasi kepada Wajib Pajak baik melalui tatap muka, program siaran radio dan juga kelas pajak.
- Optimalisasi pengawasan pembayaran pajak dari wajib pajak pendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo.
- Himbauan secara persuasif untuk pembayaran pajak PPh Final PP-23 (ex PP46) dari wajib pajak badan maupun OP non karyawan (UMKM) yang usaha sudah berjalan namun baru mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- Peningkatan jumlah dan frekuensi himbauan baik melalui surat maupun melalui media elektronik yang dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak serta lebih murah dan efektif untuk diterapkan, salah satunya dengan pengiriman SMS/*what'sapp blast* secara rutin untuk mengingatkan kewajiban pembayaran pajak.

**2. IKU 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Uraian	Persentase
Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2024	100%
Realisasi Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2024	136,73%
Capaian	120,00%

Untuk IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, KPP Pratama Watampone memiliki jumlah wajib SPT pada tahun 2024 sebesar 49.494 yang berkurang sekitar 29,39 % dari wajib SPT pada tahun 2023 sebesar 70.095. Realisasi penyampaian SPT tahunan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
Target SPT Wajib Pajak Strategis	500	500
Target SPT Wajib Pajak Kewilayahan	69.595	48.994
Realisasi Kepatuhan Penyampaian SPT	71.087	56.381
Capaian Kepatuhan Penyampaian SPT	101,42%	113,91%

Kenaikan Capaian Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 yang lebih tinggi dibanding tahun 2023 ini didukung dengan kegiatan yang telah dilakukan KPP Pratama Watampone antara lain:

- Peningkatan himbauan baik melalui surat maupun media elektronik, termasuk *whats'app blast*, dan *outbound call*.
- Peningkatan frekuensi edukasi kepada Wajib Pajak baik melalui tatap muka, program siaran radio dan juga kelas pajak.
- Penerbitan surat teguran pelaporan SPT Tahunan.
- Peningkatan jangkauan layanan perpajakan khususnya bagi Wajib Pajak yang berada di wilayah yang sulit dijangkau, salah satunya dengan membuka Pos

Pelayanan Pajak di Kecamatan Siwa yang berjarak lebih dari 100 km dari KPP Pratama Watampone.

- Bekerja sama dengan asosiasi, kelompok usaha tertentu seperti kelompok tani, koperasi, kontraktor untuk memfasilitasi kewajiban pelaporan SPT Tahunan.
- Pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi yang mudah, murah, cepat, dan jangkauannya luas.

Selain itu, kegiatan mitigasi risiko juga telah dilaksanakan KPP Pratama Watampone antara lain dengan:

- Melakukan Program Penelitian Wajib Pajak Non Efektif secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang tidak melapor dua tahun berturut-turut dan memiliki penghasilan di bawah 60 juta setahun.
- Melakukan kerjasama dengan pemberi kerja/pimpinan/bendahara untuk mendorong pelaporan SPT.
- Membuat kelas pajak secara rutin.
- Mengadakan bimbingan dan/atau sosialisasi kepada Wajib Pajak yang terkait pemotongan dan pemungutan.
- Membuat himbauan kepada Wajib Pajak agar melaporkan kewajiban perpajakan lebih awal melalui instansi pemberi kerja.

### 3. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan Tahun sebelumnya yang tinggi

#### 1. IKU 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM)

Uraian	Persentase
Target Penerimaan dari Kegiatan PKM 2024	100,00%
Realisasi Penerimaan dari Kegiatan PKM 2024	105,11%
Capaian	105,11%

Untuk IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) KPP Pratama Watampone, target yang ditetapkan adalah 100% sedangkan realisasi yang dicapai KPP Pratama Watampone mencapai 105,11% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
Target Penerimaan Kegiatan PKM	60.978.772.000	48.337.438.000
Realisasi Penerimaan Kegiatan PKM	59.466.396.911	50.808.618.779
Capaian Penerimaan Kegiatan PKM	97,52%	105.11%

Capaian Penerimaan dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material tahun 2024 bisa melebihi target yaitu 105,11%. Adapun kegiatan yang telah dilakukan KPP Pratama Watampone melalui:

- Penerbitan STP atas pelaporan SPT Tahunan dan Masa yang jatuh temponya selain tahun 2024 (termasuk STP PBB P3).
- Melakukan penelitian secara komprehensif atas DPP maupun DSPP Rekomendasi yang diturunkan dari Kantor Pusat (untuk menentukan persetujuan atas DPP Rekomendasi).

- Melakukan penyelesaian terhadap SP2DK outstanding berupa usul pemeriksaan ataupun kunjungan/visit.
- Pemanfaatan data Approweb (pemicu, penguji, dll) yang memiliki validitas tinggi seperti data aset, rekening dan faktur pajak sebagai bahan utama untuk penyusunan DPP Tambahan Triwulan I – IV.
- Menindaklanjuti DPP Triwulan I sampai Triwulan IV Tahun 2024 dengan berpedoman pada SE-05.

#### 4. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

##### 1. IKU 4a-CP: *Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan*

Uraian	Persentase
Target Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74,00%
Realisasi Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	88,80%
Capaian	120,00%

Pada tahun 2024, Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak, Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak, dan Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku. Untuk target rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan adalah Minimal 40 kegiatan yang terdiri dari maksimal 4 Kegiatan Tema I, maksimal 16 Kegiatan Tema II, dan minimal 20 Kegiatan Tema III. Kegiatan Tema III sendiri terdiri dari Minimal 10 kegiatan dalam bentuk *One on One*, dan Minimal 10 kegiatan dalam bentuk *One to Many*, selain itu 1 (satu) kegiatan diantaranya adalah *Business Development Services* (BDS).

Kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan KPP Pratama Watampone yang telah dilaksanakan untuk Tema I dengan realisasi 10 kegiatan, Tema II dengan realisasi 53 kegiatan, Tema III dengan realisasi 27 kegiatan *One to One*, dan 24 kegiatan *One to Many*.

Keberhasilan ini dikarenakan hubungan atau sinergi dengan Instansi Pemerintahan dan asosiasi/perkumpulan non formal di wilayah kerja KPP Pratama Watampone, diharapkan dengan banyaknya edukasi yang dilakukan kepada wajib pajak dan para generasi penerus bangsa, dapat menaikkan jumlah penerimaan pajak yang masuk ke kas negara.

##### 2. IKU 4b-N: *Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan*

Uraian	Persentase
Target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%
Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	107,81%
Capaian	107,81%

Selama Tahun 2024, KPP Pratama Watampone tidak menerima pengaduan atas pelayanan perpajakan dari pihak wajib pajak ataupun masyarakat umum. Keberhasilan tidak adanya pengaduan pelayanan perpajakan ini dikarenakan adanya pembinaan secara terus – menerus kepada *frontliner* akan pentingnya bersikap dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara prima. Selain itu sebagai pencegahan responden yang tidak merespon untuk mengisi survei KPP Pratama Watampone melakukan *outbond call* untuk mengingatkan dalam pengisian survei.

KPP Pratama Watampone secara maksimal menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. KPP Pratama Watampone akan selalu siap menindaklanjuti apabila ada ketidakpuasan ataupun pengaduan masalah pelayanan perpajakan.

## 5. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan Pembayaran masa yang efektif

### 1. IKU 5a-CP: Persentase pengawasan pembayaran masa

Uraian	Persentase
Target Presentase Pengawasan Pembayaran Masa	90,00%
Realisasi Presentase Pengawasan Pembayaran Masa	120,00%
Capaian	120,00%

Target persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif ditetapkan 90%, dalam perhitungan realisasi presentase pengawasan pembayaran terbagi menjadi dua yaitu atas Pengawasan Strategis dan Kewilayahan yang keduanya masing – masing menanggung 50% dari seluruh target pengawasan pembayaran masa. Dalam Pengawasan Strategis KPP Pratama Watampone pada tahun 2024 melakukan 3 (tiga) kegiatan yaitu: Menerbitkan STP yang seharusnya diterbitkan, Melaksanakan penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan Melakukan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan. Adapun target dan realisasi yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Target	Realisasi
Penerbitan STP	554	796
Dinamisasi PPh 25	3	4
Tindak lanjut data tersedia	18	29

Atas 3 (tiga) kegiatan yang diampu oleh Strategis setiap kegiatan juga memiliki bobot peranan yang berbeda dalam perhitungan pencapaian kinerja. Penerbitan STP dengan bobot 30%, Dinamisasi PPh 25 dengan bobot 40%, dan Tindak lanjut data tersedia dengan bobot 30%.

Selain itu dalam Pengawasan Kewilayahan, KPP Pratama Watampone pada tahun 2024 juga melakukan 3 (tiga) kegiatan yaitu: Menyelesaikan daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti, Penambahan wajib pajak dari hasil

ekstensifikasi, dan Melakukan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan. Adapun target dan realisasi yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Target	Realisasi
Penerbitan STP	6254	7924
Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi		
Capaian Kuantitas	110	122,47
Capaian Kualitas	44	83,50
Tindak lanjut data tersedia	21	183

Hampir sama dengan tiga kegiatan yang diampu oleh Strategis, setiap kegiatan di Kewilayahan juga memiliki bobot peranan yang berbeda dalam perhitungan pencapaian kinerja. Penerbitan STP dengan bobot 30%, Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi dengan bobot 40%, dan Tindak lanjut data tersedia dengan bobot 30%.

Adapun dalam memitigasi risiko agar tercapainya pengawasan pembayaran masa yang efektif KPP Pratama Watampone telah melakukan:

- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya yang jatuh temponya pada Tahun 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas data Approweb dengan memprioritaskan tahun pajak dan nilai potensi pajak.

Selain itu hal – hal yang telah dilakukan KPP Pratama Watampone untuk mencapai seluruh kegiatan tersebut antara lain:

- Penerbitan STP atas pelaporan SPT Tahunan dan Masa yang jatuh temponya pada tahun 2024 (atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan) dengan nilai sanksi minimal Rp100.000,- utk Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan.
- Penerbitan SP2DKE berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) dan data KPDL untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dan LHP2DK terutama terhadap yg ingin mendaftarkan/seharusnya memiliki NPWP.
- Menindaklanjuti DSE outstanding dan menerbitkan SP2DK atas data pemicu yang terbit di tahun berjalan.

## 6. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif

### 1. IKU 6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Uraian	Persentase
Target Presentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100,00%

Realisasi Presentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	120,00%
Capaian	120,00%

Target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ditetapkan 100%. KPP Pratama Watampone pada tahun 2024 telah melakukan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap wajib pajak strategis maupun wajib pajak kewilayahan. Adapun target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

<b>a. Strategis</b>		
<b>KEGIATAN</b>		
<b>A. CAPAIAN PENELITIAN (Maks :120%)</b>		
1	Bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Sesuai DPP	140,20
2	Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Sesuai DPP	60
<b>B. CAPAIAN TINDAK LANJUT</b>		
1	Bobot LHP2DK Sesuai DPP	133,80%
2	Bobot LHP2DK atas SP2DK dari DPP Tahun 2022	6
3	Bobot LHP2DK SP2DK Outstanding	4,75
4	Target Tindak Lanjut	60
<b>b. Kewilayahan</b>		
<b>KEGIATAN</b>		
<b>A. CAPAIAN KUANTITAS (Maks: 120%)</b>		
1	LHP2DK dari DPP	566,20
2	Target LHP2DK dari DPP	407,30
3	LHP2DK dari SP2DK Outstanding	33,00
4	Target SP2DK Outstanding	14,80
<b>B. CAPAIAN KUALITAS</b>		
1	Bobot LHP2DK	560,35
2	Target LHP2DK	419,10

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Terdapat dua kegiatan pokok penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yaitu dalam Strategis dan Kewilayahan. Pada kegiatan Strategis terdapat 2 (dua) aspek yang harus dicapai yaitu atas penilaian penelitian dan penilaian tindak lanjut mulai dari penyelesaian DPP, penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2023, dan penyelesaian SP2DK *Outstanding*. Untuk kegiatan Kewilayahan dibagi menjadi 2 (dua) aspek yang harus dicapai yaitu atas penilaian kuantitas penyelesaian SP2DK dari DPP serta *Outstanding* dan penilaian kualitas atas realisasi LHP2DK.

Capaian ini disebabkan adanya perencanaan yang matang mulai dari pengolahan data untuk menentukan Wajib Pajak yang akan dihimbau hingga

tindaklanjut himbauan yang diterbitkan oleh *Account Representative* diadministrasikan dan dieksekusi dengan baik. Adapun yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Watampone dalam memitigasi risiko kinerja permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah dengan cara meningkatkan validitas data berdasarkan pengalaman sebelumnya, perbandingan antara data, dan kemungkinan realisasi yang bisa didapat. Selain itu hal – hal yang sudah dilakukan KPP Pratama Watampone untuk mencapai kegiatan tersebut adalah dengan cara:

- Melakukan penelitian secara komperhensif atas DPP Rekomendasi yang diturunkan dari Kantor Pusat (untuk memutuskan *adjustment* atas DPP Rekomendasi).
- Memanfaatkan CRM-IRE sebagai bahan sasaran DPP tambahan.
- Pemanfaatan data Approweb (pemicu, penguji, dll) yang memiliki validitas tinggi seperti data aset, rekening dan faktur pajak sebagai bahan utama untuk pengawasan kepatuhan material, termasuk mencari data tambahan/pendukung di luar approweb, seperti Pemanfaatan data ILAP sebagai bahan dalam penyusunan DPP.
- Melakukan penyelesaian terhadap SP2DK outstanding berupa usul pemeriksaan ataupun kunjungan/visit.

## 2. IKU 6b-N: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Uraian	Persentase
Target Presentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%
Realisasi Presentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	119,41%
Capaian	119,41%

Target capaian Persentase pemanfaatan data selaian tahun berjalan adalah 100%. Pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata – rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP				
	Target		Realisasi		Persentase
	Dafnom STP	Target STP	STP Terbit	Nominal STP	STP %
a	b	c	d	e	f = d/c
KPP Pratama Watampone	467	522	1.128	1.967.108.250	120.00%
Seksi Pengawasan I	272	272	409	1.371.219.732	120.00%
Seksi Pengawasan II	29	29	55	33.392.798	120.00%
Seksi Pengawasan III	44	44	86	45.565.555	120.00%
Seksi Pengawasan IV	9	9	159	372.763.715	120.00%
Seksi Pengawasan V	113	113	419	144.166.450	120.00%

Unit Kerja	Pemanfaatan Data Matching				
	Target		Realisasi		Persentase
	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP	Data Matching %
a	g	h	i	j	k = (i+j)/h
KPP Pratama Watampone	304	237	30	330	120.00%
Seksi Pengawasan I	180	142	13	160	120.00%
Seksi Pengawasan II	32	24	5	56	120.00%

Seksi Pengawasan III	18	14	4	30	120.00%
Seksi Pengawasan IV	25	19	1	30	120.00%
Seksi Pengawasan V	49	38	7	54	120.00%

KPP Pratama Watampone pada tahun 2024 telah menerbitkan 1.128 STP dan menindaklanjuti 360 Data Pemicu dengan capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 120%.

Kegiatan ini menunjukkan pengawasan *Account Representative* telah berjalan efektif dan maksimal terhadap pemanfaatan data yang diperoleh sampai dengan waktu yang ditentukan. Hal – hal yang telah dilakukan yaitu antara lain:

- Penerbitan STP atas pelaporan SPT Tahunan dan Masa (atas masa pajak Januari 2019 sampai dengan masa pajak Oktober 2022 untuk STP Masa, dan tahun pajak tahun 2020 sampai 2022 untuk STP Tahunan) dengan nilai sanksi minimal Rp. 100.000,- untuk WP Strategis dan Kewilayahan.
- Penerbitan LHPt berdasarkan pemanfaatan data pemicu masa pajak sebelum November 2023 dan data pemicu dengan tahun pajak sebelum tahun 2023.

## 7. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan Hukum yang Efektif

### 1. IKU 7a-CP: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian

Uraian	Persentase
Target Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%
Realisasi Presentase Nilai Ketetapan Dibayar pada Tahun Berjalan	105,90%
Capaian	120,00%

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dihitung atas 5 (lima) variabel dengan rincian sebagai berikut:

NAMA VARIABEL		ANGKA MUTLAK			
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	Sub Variabel 1a	36	Sub Variabel 1b	25.2
			37,6		37,6
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	90.070.214.372			
		9.215.487.484			
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	39.1			
		52			
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	48.20			
		47			
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	1			
		1			

	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	99,28%	120,00%	18,00%

2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	117,36%	117,36%	29,34%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	75,19%	75,19%	22,56%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	102,55%	102,55%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100,00%	120,00%	6,00%
<b>Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>105,90%</b>

\*Maksimal 105%

Untuk Kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan KPP Pratama Watampone target yang ditetapkan adalah 80%, realisasi pencapaiannya sebesar 105,90% sehingga mendapat capaian 120%. Hal – hal yang telah dilakukan KPP Pratama Watampone sehingga dapat memaksimalkan efektivitas pemeriksaan antara lain dengan:

- Menghubungi secara langsung contact center masing masing aplikasi yang bermasalah.
- Melakukan pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak agar dapat diminta untuk bertemu di KPP maupun di lokasi usaha Wajib Pajak.
- Melakukan pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak agar bisa lebih memahami terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- Melakukan pembahasan potensi bersama seksi pengawasan baik kewilayahan maupun strategis baik sebelum melakukan *close* LHP2DK usul pemeriksaan pada approweb maupun saat pembuatan Kertas Kerja Analisis melalui aplikasi portal p2.

Hal ini didukung juga dengan kegiatan mitigasi risiko yang KPP Pratama Watampone lakukan antara lain:

- Mengoptimalkan usulan pemeriksaan melalui DSPP Strategis dan Kewilayahan.
- Melakukan pembahasan dengan *Account Representative* terkait Wajib Pajak yang berpotensi *close* LHP2DK berstatus usulan pemeriksaan.

## 2. IKU 7b-CP: Efektivitas penagihan

Uraian	Persentase
Target Efektivitas Penagihan	75,00%
Realisasi Efektivitas Penagihan	84,82%
Capaian	113,09%

Target efektivitas penagihan ditetapkan sebesar 75%. KPP Pratama Watampone berhasil merealisasikan 84,82% sehingga indeks capaiannya adalah 113,09%. Dalam menghitung efektivitas penagihan terdapat 3 (tiga) variabel yang dinilai mulai dari tindakan penagihan, tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPP), dan pencairan DSPP.

Pada tahun 2024 telah melaksanakan tindakan penagihan sebagai berikut:

Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Presentase Realisasi
Teguran	6.500	6.989	107,52%
Surat Paksa	1.426	1.964	137,73%

Penyitaan	61	44	72,13%
Pemblokiran	32	54	168,75%
Lelang	10	21	210,00%

Untuk penyelesaian DSPC sebagai berikut:

Penyelesaian DSPC	Target	Realisasi
Tindak Lanjut	35	50
Pencarian	2.703.708.872	7.447.750.000

Keberhasilan ini dikarenakan KPP Pratama Watampone melakukan tindakan penagihan persuasif, memonitoring pencapaian kinerja secara manual setiap minggu menggunakan sumber data dari SIDJP (Informon) dan MPN Info, menerbitkan Surat Teguran dengan melampirkan nomor konfirmasi yang dapat dihubungi wajib pajak (Seksi Penagihan), dan melakukan pembahasan dan memperbarui wajib pajak yang ada dalam DSPC. Selain itu memitigasi risiko atas ketidak tagihan piutang pajak dengan cara:

- Mengadakan kegiatan bersama antar seksi secara berkala terkait penyelesaian piutang pajak.
- Melakukan pendataan piutang pajak yang daluwarsa dan melakukan penghapusan data piutang pajak yang sudah daluwarsa.
- Mengingatkan melalui media elektronik terkait utang pajak Wajib Pajak dan meminta untuk melakukan pembayaran (*What's app*, Telepon, dan *e-mail* Wajib Pajak).

### 3. IKU 7c-N: Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan

Uraian	Persentase
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	1
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	1
Capaian	100,00%

Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah sebesar 1 dan KPP Pratama Watampone berhasil merealisasikan, sehingga indeks capaiannya adalah 100,00%.

Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan IKU tersebut yaitu setiap AR pada seksi pengawasan strategis dan pengawasan kewilayahan serta Supervisor Pemeriksa Pajak diminta untuk menyiapkan 1 (satu) Wajib Pajak dan akan dilakukan Pra Case Building di tingkat KPP dengan membuat banyak pilihan WP untuk mencari kualitas WP yang akan diusulkan.

Atas WP yang terpilih akan dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Tim Penyidik Kanwil, WP yang disetujui akan diusulkan usulan pemeriksaan Bukper, yang tidak disetujui akan dilaksanakan kolaborasi dengan Penyidik Kanwil. Terhadap WP yang disetujui akan dilakukan penelaahan usul Bukper.

Jika Tim Telaah Kanwil setuju maka akan dibuatkan BA Penelaahan Usulan Bukper dan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP) sehingga realisasi penyampaian usul bukti permulaan sudah dapat diakui.

## 8. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan Informasi yang berkualitas

### 1. IKU 8a-CP: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Uraian	Persentase
Target Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
Realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	125,78%
Capaian	120,00%

Terdapat 2 (dua) aspek dalam perhitungan persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, yang pertama yaitu penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Dalam kegiatan penyelesaian laporan pengamatan KPP Pratama Watampone mendapat target 4 (empat) dan menyelesaikan 7 (tujuh) laporan pengamatan, sehingga realisasinya 175%. Selanjutnya KPP Pratama Watampone menyediakan data potensi perpajakan 1.355 data dari target diminta 1.030 data, sehingga realisasinya 131,55%. Dari 2 (dua) aspek tersebut karena masing – masing menanggung 50% dari realisasi sehingga realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah 125,78 dan untuk indeks capain di 120%.

Hal – hal yang telah dilakukan KPP Pratama Watampone sehingga kinerja ini dapat tercapai adalah dengan:

- Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) pada awal waktu agar hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk triwulan – triwulan berikutnya.
- Melakukan kegiatan perekaman data hasil pengumpulan data lapangan pada aplikasi alket SIDJP NINE dan KPD L *Mobile*.
- Melakukan kegiatan penelitian formal untuk data hasil kegiatan KPD L pada Seksi Penjamin Kualitas Data.

### 2. IKU 8b-CP: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Uraian	Persentase
Target Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	100,00%
Capaian	120,00%

Target presentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebesar 55% yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penghimpunan data regional utama yang menanggung bobot perolehan 60% dan penghimpunan data regional lainnya yang menanggung bobot perolehan 40%. Penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Watampone adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Data	Realisasi
Data Regional Utama	30	30
Data Regional Lainnya	16	16

Atas keseluruhan data yang diperoleh, realisasi presentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Watampone adalah 100,00% dengan indeks capaian 120%. Didukung dengan beberapa hal yang telah dilakukan mulai dari melakukan konfirmasi ketersediaan data ke Pemda, mengirimkan surat permintaan data, mengolah data yang diterima, dan mengirimkan data yang telah diolah ke Kanwil.

## 9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif IKU

### 1. 9a-N: Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Indeks kinerja ini diukur dengan dua komponen, yaitu komponen kualitas kompetensi dan komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Adapun komponen kualitas kompetensi terdiri atas aspek pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural (50%) dan tingkat pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional (35%)

Komponen komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM:

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan)
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang)

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan sesuai dgn target waktu

Uraian	Persentase
Target Presentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	77,00%
Realisasi Presentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	100,00%
Capaian	120,00%

Target capaian Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi ditetapkan sebesar 77% yang diukur dari dua aspek yaitu persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi 100% dengan bobot 60% dan persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi 100% dengan bobot 40%, realisasi Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang diperoleh adalah 100% sehingga indeks capaiannya 120%.

Hal ini didukung dengan KPP Pratama Watampone membuat nota dinas yang menunjuk pegawai yang wajib mengerjakan modul *e-learning*, dengan harapan menambah pengetahuan dan bekal menghadapi uji kompetensi dan pada awal Triwulan IV, mengingatkan serta mengimbau kepada pegawai yang akan ikut uji kompetensi tahun depan agar mempersiapkan diri dengan merencanakan atau menjadwalkan *e-learning* melalui studia. Selain itu melakukan mitigasi risiko dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rencana pembelajaran yang telah disusun khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi di unit kerjanya telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.

## 2. IKU 9b-N: Indeks penilaian integritas unit

Uraian	Persentase
Target Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%
Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit	92,84%
Capaian	109,23%

Target capaian Indeks Penilaian Integritas Unit ditetapkan sebesar 85 persen yang diukur dari survey terhadap pihak eksternal yang telah menerima pelayanan dari KPP Pratama Watampone dalam menjalankan tugas pelayanan, pengawasan, penegakan hukum berupa pemeriksaan dan penagihan pajak periode pelayanan tahun 2024, realisasi nilai indeks yang diperoleh adalah 92,84 sehingga indeks capaiannya 109,23%.

Capaian ini dapat diraih berkat pegawai KPP Pratama Watampone dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi integritas serta menjalankan kode etik dan kode perilaku. Didukung dengan hal – hal yang telah dilakukan KPP Pratama Watampone dengan cara:

- Pimpinan mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga integritas pada setiap kesempatan.
- *In House Training* Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
- Memberikan pelayanan terbaik ke wajib pajak serta dapat merekam NPWP, nama, nomor *what's app* aktif, alamat email aktif pada *gform* guna kepentingan responden.

Selain itu dengan melakukan mitigasi risiko dengan cara pemanfaatan *Fraud Risk Scenario*, melaksanakan pengawasan kode etik dan perilaku pegawai, dan pemasangan penghargaan dan/atau capaian atas kinerja pelayanan di tempat strategis yang dapat dijangkau oleh wajib pajak untuk dapat memberikan persepsi positif di masyarakat.

## 3. IKU 9c-N: Indeks efektivitas implementasi kinerja dan manajemen risiko

Uraian	Persentase
Target Indeks Penilaian Integritas Unit	90,00%
Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit	97,71%
Capaian	108,57%

Target capaian Indeks efektivitas implementasi kinerja dan manajemen resiko ditetapkan sebesar 90% yang diukur dari 2 (dua) aspek penilaian yaitu Efektivitas implementasi kinerja nilai 100% dengan bobot 50% dan Manajemen Risiko nilai 100% dengan bobot 50%. Sehingga realisasi persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Resiko yang selesai dijalankan adalah 100% atau indeks capaiannya 108,57%.

Capaian ini dapat diraih berkat kegiatan yang telah dilakukan KPP Pratama Watampone antara lain:

- Untuk keefektifan dan kualitas DKO, maka dilakukan persiapan permintaan LCK dari masing – masing Seksi atau Subbag terkait.
- Pelaksanaan Rapat DKO telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Pemantauan atas Nilai Kinerja Organisasi & Pelaksanaan, dan Rencana Mitigasi Risiko dilakukan secara intens terutama sebulan sebelum Rapat DKO.
- Menentukan atau membuat Matriks Tindak Lanjut.
- Pembahasan Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko.
- Subbag Umum KI sebagai pengawas membuat Laporan Efektivitas Waktu.
- Membuat nota dinas Kepala Kantor agar masing – masing PIC setelah melaksanakan kegiatan bagian MR, dapat merekam pada *gform*.

Dan memitigasi risiko dengan cara melakukan pemantauan penerapan Manajemen Risiko secara berkala melalui pembahasan Dialog Kinerja Organisasi

## 10. Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

### 1. IKU 10a-CP: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Uraian	Persentase
Target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%
Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	108,25%
Capaian	108,25%

Target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ditetapkan sesuai nilai indikator kualitas pelaksanaan anggaran dengan bobot 50% dan nilai smart dengan bobot 50%. Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah 108,25% atau indeks capaiannya 108,25%.

Indikator kualitas pelaksanaan anggaran, diukur dari 3 (tiga) aspek yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sedangkan SMART, diukur dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output dan efisiensi.

Capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat diraih karena perencanaan pengeluaran yang hati-hati dan realisasi yang terus dipantau. KPP Pratama Watampone mengatur pos dan besaran pengeluaran dengan seksama agar setiap belanja yang dilakukan efektif dan efisien, serta dapat memberikan dampak positif yang maksimal. Selain itu, melaksanakan mitigasi risiko dengan cara melakukan rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi Kepala Kantor dan setiap Seksi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk keseluruhan belanja KPP Pratama Watampone, realisasi pengeluaran mencapai 99,02% dengan rincian realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp6.464.502.359,- dari Pagu DIPA Rp6.528.603.000. Realisasi belanja KPP Pratama Watampone pada tahun anggaran 2024 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut:

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	726.854.000	693.555.000	95,42
Belanja Barang	5.606.623.000	5.452.115.636	99,68
Belanja Modal	241.596.000	228.831.723	94,72
<b>Jumlah</b>	<b>6.528.603.000</b>	<b>6.464.502.359</b>	<b>99,02</b>

### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

Uraian Belanja	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Keterangan
Belanja Pegawai	773.595.000	693.555.000	-
Belanja Barang	5.308.432.557	5.452.115.636	-
Belanja Modal	3.659.852.981	228.831.723	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.741.880.538</b>	<b>6.464.502.359</b>	-

Anggaran dilakukan untuk pembiayaan berupa :

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berikut merupakan uraian penggunaan anggaran terkait belanja pegawai tahun 2024:

URAIAN	JUMLAH
DIPA Tahun 2024	
Pagu Anggaran Belanja Pegawai	Rp 773.595.000
Realisasi Anggaran	Rp 693.555.000
Persentase Realisasi Anggaran	95,42%

## 2. Belanja Barang

Belanja barang digunakan untuk pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan perkantoran yang terdiri dari belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas, belanja barang operasional lainnya, belanja jasa, belanja langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, belanja pemeliharaan, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja perjalanan biasa.

Berikut merupakan uraian penggunaan anggaran terkait belanja barang tahun 2024:

URAIAN	JUMLAH
DIPA Tahun 2024	
Pagu Anggaran Belanja Barang	Rp 5.606.623.000
Realisasi Anggaran	Rp 5.452.115.636
Persentase Realisasi Anggaran	99,68%

## 3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Berikut merupakan uraian penggunaan anggaran terkait belanja modal tahun 2024:

URAIAN	JUMLAH
DIPA Tahun 2024	
Pagu Anggaran Belanja Modal	Rp 241.596.000
Realisasi Anggaran	Rp 228.831.723
Persentase Realisasi Anggaran	94,72%



## BAB IV PENUTUP

---

Perkembangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan serta sasaran dalam mengacu pada visi dan misi.

Adapun permasalahan atau kendala yang dialami selama tahun 2024 adalah Wilayah Kerja KPP Pratama Watampone yang terdiri dari 3 Kabupaten, 49 kecamatan dan 618 desa/kelurahan menjadi tantangan bagi KPP Pratama Watampone untuk menyediakan pelayanan, melakukan pengawasan dan mencapai sasarnya. Namun dengan kerja sama yang baik dan optimal dengan seluruh pegawai dan *stakeholder* diharapkan KPP Pratama Watampone mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di tahun 2025. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPP Pratama Watampone Tahun 2024 ini dibuat.

## **LAMPIRAN**

1. Kontrak Kinerja KPP Pratama Watampone Tahun 2024  
Terlampir di BAB II bagian E. Penetapan Kinerja
2. Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024  
Terlampir di BAB III bagian A. Capaian Kinerja Organisasi

# LAPORAN KINERJA (LAKIN)

TAHUN 2024

KPP PRATAMA WATAMPONE



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK